



VOLUME XII / NO. 124 / JANUARI 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KALEIDOSKOP 2017



Daftar Isi



Foto Cover
Anas Nur Huda



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Riahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulistuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Triana Kusumadewi, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ilka Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin,. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman, . **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

KALEIDOSKOP

- 12 Menciptakan APBN yang Berkeadilan
- 18 Menjaga Ekonomi Terus Bertumbuh
- 22 Semua Demi Penerimaan Negara
- 28 Serba Serbi Ketentuan Barang Bawaan Penumpang
- 34 Infrastruktur Pantang Mundur
- 40 Mendulang Cerita Dari Ujung Desa
- 46 Menyejahterakan Dengan Pemerataan
- 52 LKPP Mencetak Rekor

Kaleidoskop 2017: Optimisme Ekonomi Indonesia

Sepanjang tahun 2017, pemberitaan mengenai kinerja ekonomi Indonesia tergambar optimis. Hal ini terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia yang terus meningkat. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut merupakan indikator yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data. Data tersebut dikeluarkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam publikasinya berjudul Government at a Glance 2017, pada Senin (17/7).

Pada tahun 2016, sebanyak 80 persen dari responden menyatakan kepercayaan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Tingkat kepercayaan Indonesia naik sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2007. Berdasarkan hasil survey ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi

untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.

Di tahun 2017, Indonesia juga memperoleh berbagai pengakuan atas reformasi ekonomi dan struktural. Indeks kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) Indonesia berhasil naik 15 peringkat ke posisi 91. Hal ini membuat Indonesia masuk dalam jajaran Top Improvers berada di atas India, Brazil, dan Filipina. Selain itu, Global Competitiveness Index 2017-2018 juga menaikkan peringkat Indonesia sebanyak 5 peringkat, dari posisi 41 menjadi 36.

Di tahun yang sama, penantian panjang berakhir sudah. Lembaga pemeringkat kredit internasional Standard & Poor (S&P) akhirnya menaikkan *sovereign rating* Indonesia menjadi BBB- dengan *outlook* stabil.

Setelah sebelumnya Moody's memberikan peringkat yang sama, maka lengkap sudah kini peringkat layak investasi diraih dari lembaga-lembaga terkemuka. Menutup tahun dengan manis, lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan *sovereign rating* Republik

Indonesia dari BBB-/outlook positif menjadi BBB/outlook stabil pada Rabu (20/12).

Hal ini melengkapi pencapaian Indonesia sebagai negara layak investasi yang sebelumnya telah diperoleh dari sejumlah lembaga rating lain, seperti Fitch, Moody's, Japan Credit Rating, dan Rating and Investment. Yang lebih menggembirakan lagi, untuk pertama kalinya sejak 12 tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.

Memasuki tahun 2018, perekonomian Indonesia akan terus digenjut. Pembangunan infrastruktur pun terus dilakukan. Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan pun semakin strategis.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Anugerah Media Humas



Kementerian Keuangan
Mendapatkan 4 Penghargaan dalam
acara Anugerah Media Humas 2017:

- ✓ Juara Umum
- ✓ Terbaik I Kategori Social Media
- ✓ Terbaik II Kategori Media Internal
- ✓ Terbaik III Kategori Website

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Sepanjang 2017, ada 5 isu besar @KemenkeuRI, yaitu APBN, #amnestipajak, reformasi pajak dan bea cukai, pembiayaan infrastruktur & dana desa. Menurut #temankeu, tema apa yg paling menarik & apa alasannya?

Luki Antoro
@LukyAntoryo

Menurut saya yang paling menarik perhatian saya adalah APBN. Kemenkeu berupaya untuk mengefektifkan penggunaannya utk program prioritas pemerintah. Saya tertarik bagaimana pembangunan lewat APBN nanti dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi juga. isu yang mantap!

Mik.
@brendayolla

#amnestipajak bnyk org yg brpenghasilan tinggi & pny aset mewah ttp target pjg yg dhrpkan pemerintah masih blm trcapai. prlu koreksi dr pribadi Wajib Pajak yg harusnya paham kalau membayar pajak itu wajib & nntinya jg akn kmbli bermanfaat utk kita smua

ricky anggara
@ricky_anggara

Dana desa paling menarik karna memberikan peluang terhadap desa untuk mengembangkan pembinaan dan tambahan dana untuk kemajuan desa mulai dari bumdes sampai pendidikan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik



Wajah Masa Depan

Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Orientasi 6.670 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung Sentul International Convention Center (20/12). CPNS baru ini merupakan hasil dari program Rekrutmen Umum Tahun Anggaran 2017 dan Rekrutmen Lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Penerimaan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan organisasi karena sebagian pegawai yang sudah memasuki masa purna bakti, serta perubahan dinamika organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

Foto
Irfan Bayu



Mengolah Sagu

Tak perlu diragukan lagi sago menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia Timur. Pohon sago tumbuh subur dan melimpah di hampir sebagian besar wilayah Maluku dan Papua. Tak banyak orang tahu bahwa mengolah pohon sago menjadi makanan olahannya memerlukan usaha yang tak mudah. Sebut saja mulai dari proses menebang pohon, memotong, mengupas kulit batang, memarut dengan mesin, sampai dengan melarutkan dalam air hingga menghasilkan endapan sago. Pohonnya sendiri memerlukan waktu kurang lebih 15 hingga 20 tahun sampai siap dipanen. Namun demikian, makanan hasil olahan sago, seperti papeda, menjadi santapan lezat yang tak bisa dilupakan oleh siapapun.

Foto
Angga Rindra

Teks
Abdul Aziz

Kilas Balik Peristiwa 2017

Januari

19 Menkeu mengabdikan nama Mar'ie Muhammad sebagai nama salah satu Gedung di Ditjen Pajak.

23 Pelantikan Sumiyati menjadi Inspektur Jenderal Kemenkeu menggantikan Ki Agus Badaruddin yang menjadi kepala PPATK. Menkeu juga melantik Astera Prima sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.

Februari

9 Menkeu mengeluarkan PMK Nomor 15/PMK.010/2017 dan PMK Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai dasar kenaikan santunan kecelakaan lalu lintas sampai dengan 100 persen.

22 Menkeu dan Presiden Joko Widodo mengadakan sosialisasi terakhir atau farewell tax amnesty di JIExpo Kemayoran

Maret

31 Menkeu meluncurkan kartu KartiN1 sebagai kartu yang terintegrasi untuk digunakan pada layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, NPWP, Kartu ATM, e-money, e-toll, dll

Hari terakhir penerapan program tax amnesty di mana Menkeu akan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan teknologi pengumpulan pajak, serta perbaikan data sumber daya manusia (petugas pajak) dalam melaksanakan tugasnya.

April

11 Pada pertemuan The 3rd Islamic Development Bank Countries Sovereign Investments Forum (IDB SIF) 2017 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali pada 10-12 April 2017, Menkeu menawarkan 225 proyek kepada sejumlah investor.

19 Pertemuan Spring Meeting IMF-World Bank dengan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral dari seluruh dunia, termasuk lembaga kemasyarakatan internasional dan para akademisi.

Juli

7 Kunjungan Menkeu dan Presiden RI dalam pertemuan tahunan negara-negara anggota G20 di Hamburg, Jerman.

17 Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government. Data tersebut dikeluarkan oleh OECD Government at a Glance 2017

20 Hasil penilaian terhadap reformasi birokrasi K/L yang dilakukan Kemneterian PANRB memberikan nilai A bagi Kemenkeu selain Badan Pemeriksa Keuangan.

Oktober

12 Menkeu menghadiri seminar The Belt and Road Initiative Building Bonds Across Asia, Europe and Beyond. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan IMF-World Bank Group Annual Meetings 2017 di Washington DC.

25 RAPBN 2018 disahkan DPR dengan postur anggaran belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun. Untuk defisit RAPBN 2018, pemerintah menargetkan sebesar 2.19%

Mei

18 Parlemen menyetujui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

19 Standard and Poor's (S&P) menaikkan peringkat layak investasinya kepada Indonesia dengan peringkat BBB- dan outlook stable.

Agustus

7 Pelantikan Lucky Al Firman dan Arif Baharudin sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara dan Staf Ahli Bidang Kebijakan Fiskal.

11 Menkeu memberikan edukasi kepada siswa dan mahasiswa mengenai pajak melalui program 'Pajak Bertutur.' Acara ini dilakukan secara streaming di Gedung Mar'ie Muhammad DJP kepada 2.182 sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.

November

23 Menkeu bersama Menteri PUPR, Kepala Bekraf, dan Ketua Inasgoc meninjau persiapan pembangunan infrastruktur Asian Games 2018 (Gelora Bung Karno)

30 Menkeu melantik Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak menggantikan Ken Dwijugasteadi dan Lucky Al Firman sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Juni

1 Kemenkeu menerbitkan Samurai Bonds setelah obligasi berdenominasi dolar dikeluarkan sebelumnya. Pada obligasi ini, Kemenkeu mengeluarkan tiga seri obligasi, yaitu RIJPY0620, RIJPY0622, dan RIJPY 0624.

5 Kemenkeu telah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan AEoI melalui PMK Nomor 70/PMK.03/2017 tanggal 31 Mei 2017.

September

6 Kemenkeu membuka lowongan CPNS sebanyak 2.880 formasi pegawai dari 17.428 formasi pegawai negeri sipil di beberapa K/L yang membutuhkan.

20 Pemerintah telah mengumpulkan dana penjualan SUN (obligasi) untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp17.5 triliun dari enam seri SUN (obligasi), yaitu SPN03171221, SPN12180607, FR0061, FR0059, FR0075, dan FR0076

Desember

7 Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018, kepada 86 kementerian dan lembaga (K/L).

20 Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) meningkatkan Sovereign Credit Rating Indonesia dari BBB-/Outlook Positif menjadi BBB-/Outlook Stabil.





MENCIPTAKAN APBN YANG BERKEADILAN

Optimisme terhadap perekonomian Indonesia semakin terlihat di tahun 2018. Pembangunan infrastruktur tengah digalakkan, peningkatan penerimaan negara melalui reformasi bidang perpajakan dan bea cukai pun telah dijalankan. Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan pun semakin strategis.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Oktober 2017 akhirnya menyetujui kebijakan APBN Tahun 2018. Mengusung tema “Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan,” APBN 2018 optimis mencapai sasaran pembangunan melalui belanja produktif dan sesuai prioritas nasional. “APBN 2018 didesain menjaga momentum ekonomi untuk menciptakan optimisme, kesempatan kerja, dan memperbaiki kualitas ekonomi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2018 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan.

Terkait pemilihan tema APBN 2018, filosofi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan berawal dari fungsi APBN. Seperti yang diketahui, APBN memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Tiga fungsi tersebut mengarah pada tujuan menciptakan kemakmuran yang adil dan makmur.

Dalam menjalankan fungsi alokasi, pemerintah harus mampu mengalokasikan APBN dengan efektif dan efisien. Jumlah APBN yang tidak sedikit membuat pemerintah harus menyusun prioritas belanja negara. Terkait fungsi distribusi, pemerintah mengemban amanah untuk mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat untuk membangun negara dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Dalam menjalankan fungsi stabilisasi, pemerintah bertugas menstabilkan keadaan perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti inflasi dan deflasi yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tiga fungsi APBN tersebut mengarah pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan harus disertai dengan keadilan pemerataan lapangan kerja, keadilan fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. Untuk itu, ‘Pertumbuhan yang berkeadilan’ menjadi fokus utama APBN 2018.

Dampak ekonomi global

Sepanjang 2017, perkembangan perekonomian global mulai menunjukkan geliat yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pelaku ekonomi global juga telah mencari berbagai penyesuaian, termasuk Tiongkok yang pada tahun 2015 mengalami perlambatan ekonomi. Kondisi ini membuat tren perekonomian semakin membaik, khususnya saat memasuki tahun 2018. “Dilihat dari prediksi dari sisi pertumbuhan ekonomi global, maupun prediksi dari IMF-World Bank, seharusnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 itu lebih baik,” kata Direktur Penyusunan APBN Kunta Wibawa.

Perlahan namun pasti, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat. Pada akhir tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,94 persen. Kemudian merangkak naik hingga kuartal tiga tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2017, maka pemerintah merumuskan pertumbuhan ekonomi pada APBN 2018 sebesar 5,4 persen.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan pada November 2017, Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengungkapkan, “Tahun depan kita sudah bisa melihat tanda-tanda meningkatnya ekonomi kita.” Lanjutnya, ada empat indikator perekonomian yang membuat pemerintah optimis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen di tahun 2018.

Pertama, dunia ekspor dan impor Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu menurun. Kedua, pemerintah berharap dunia investasi juga mulai meningkat sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan selama dua hingga tiga tahun ini. Ketiga, pemerintah telah menyusun belanja prioritas yang akan memberikan efek besar bagi pembangunan.

Misalnya, pembangunan daerah terisolasi yang memiliki potensi wisata.

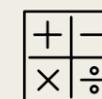
Selain itu, kemudahan berkegiatan (*ease of doing business*) bagi para investor juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan Paket-Paket Kebijakan Ekonomi. Pada Agustus 2017, Presiden Jokowi telah meluncurkan Paket Kebijakan ke-17. Paket Kebijakan Ekonomi ini bertujuan untuk memperbaiki, menyederhanakan, dan mempermudah proses ekonomi dalam dunia investasi.

Mengelola penerimaan yang optimal

Dalam menggenjot penerimaan negara, pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah berusaha membuktikan bahwa pengelolaan keuangan negara melalui APBN dilakukan secara kredibel. Menurut Askolani, upaya tersebut antara lain melakukan konsolidasi, memperkuat basis penerimaan negara, mereformasi struktur, kemudian meningkatkan kepercayaan publik bahwa masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan.

Pada postur APBN 2018, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 triliun, naik cukup signifikan dibandingkan dengan APBN 2017 sebesar 1.750,3 triliun. Jumlah Rp1.894,7 triliun ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp275,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,2 triliun.

Mengenai penerimaan perpajakan yang naik dibandingkan APBN 2017, Askolani mengungkapkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui reformasi perpajakan untuk menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. “Pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa uang dari pajak dikembalikan untuk membantu



Postur Anggaran APBN untuk Perekonomian Makin Sehat dan Kuat			
	Realisasi APBN 2017	APBN-P 2017	APBN 2018
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,01 *	5,2	5,4
Inflasi (% yoy)	3,7	4,3	3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.331	13.400	13.400
Harga Minyak (US\$/barrel)	5,0	5,2	5,2
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	48,9	48	48
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	794,2 **	815	800
Lifting Gas (ribu barrel/hari)	1.112,8**	1.150	1200

*Realisasi Semester I tahun 2017
** Realisasi s.d Agustus 2017

orang yang kurang mampu, menyediakan bisnis untuk orang yang mampu, bahkan sampai ke pelosok Indonesia,” tambah Askolani.

Belanja prioritas

Dalam APBN 2018, belanja negara diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan infrastruktur, serta pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. Hal tersebut dilakukan

dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi.

Pemerintah menyetujui belanja negara pada APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun, lebih besar dibandingkan belanja negara pada APBN 2017 yaitu Rp2.080,5 triliun. Pada postur APBN 2018, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta Transfer ke Daerah dan

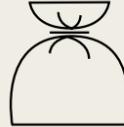
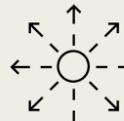
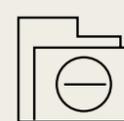
Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sama halnya dengan APBN 2017, APBN 2018 akan melanjutkan program efisiensi demi belanja negara yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Pada belanja pemerintah pusat, belanja mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa fungsi. Pertama, fungsi pelayanan umum untuk pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah, termasuk pada pihak ketiga. Kedua, fungsi ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program kefarmasian dan alat kesehatan.

Dalam menjalankan APBN 2018, pemerintah konsisten melanjutkan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Salah bentuk konsistensi tersebut yaitu dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Untuk mengejar ketertinggalan (*gap*) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, anggaran infrastruktur tumbuh 5,2 persen dari outlook tahun 2017 yaitu sebesar Rp410,4 triliun.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, anggaran pendidikan dalam APBN 2018 meningkat Rp24,3 triliun dari Outlook tahun 2017 yakni sebesar Rp444,1 triliun.

Pokok-Pokok Kebijakan APBN Tahun 2018 (dalam triliun rupiah)

	APBN 2017	APBN-P 2017	APBN 2018
 Penerimaan Negara	1.750,3	1736,1	1.894,7
 Belanja K/L	763,6	798,6	847,4
Belanja Non K/L	552,0	568,4	607,1
 Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	764,9	766,3	766,2
 Defisit Anggaran Terhadap PDB	2,41%	2,92%	2,19%
 Pembiayaan Anggaran	330,2	397,2	325,9

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2017

Pemerintah juga konsisten melanjutkan sasaran pendidikan tahun sebelumnya melalui Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Bidik Misi (meningkat 38,8 ribu mahasiswa dari APBN 2017), Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas, serta Tunjangan Profesi Guru.

Anggaran kesehatan 2018 tetap dijaga lima persen dari APBN dengan mengutamakan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain meningkatkan dan memperbaiki distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, penguatan program preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program ibu hamil serta ibu menyusui, meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan peran

“Program perlindungan sosial menunjukkan adanya dukungan kepada golongan masyarakat menengah ke bawah untuk tenaga daya beli mereka dan untuk mempertahankan agar terangkat dari level menengah ke bawah,”

**Askolani
Dirjen
Anggaran**

Pemerintah Daerah untuk *supply side* dan meningkatkan mutu layanan. Pada APBN 2018 anggaran kesehatan meningkat sebesar Rp111 triliun, sedangkan pada outlook tahun 2017 sebesar Rp104,9 triliun.

Demi mengurangi kesenjangan dan angka kemiskinan, pemerintah menyusun anggaran perlindungan sosial yang kini ada perubahan kebijakan melalui Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT). “Program perlindungan sosial menunjukkan adanya dukungan kepada golongan masyarakat menengah ke bawah untuk tenaga daya beli mereka dan untuk mempertahankan agar terangkat dari level menengah ke bawah,” jelas Askolani.

Sasaran perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan, Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JKN, Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Program Indonesia Pintar, Bidik Misi, dan Dana Desa. PKH meningkat cukup signifikan di tahun 2018 sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat, sebelumnya hanya sampai enam juta keluarga.

Terkait pemberian subsidi, pemerintah mengevaluasi dari pelaksanaan program subsidi tahun-tahun sebelumnya agar lebih tepat sasaran. Total subsidi energi pada APBN 2018 sebesar Rp94,5 triliun yang meningkat 5,1 persen dari outlook tahun 2017. Subsidi energi tersebut

meliputi Subsidi BBM dan LPG sebesar Rp46,9 triliun dan Subsidi Listrik sebesar Rp47,7 triliun.

Subsidi Non Energi ditetapkan sebesar Rp61,7 triliun, sedangkan pada APBN 2017 sebesar Rp82,7 triliun. Kebijakan subsidi non energi ini merupakan sinergi bersama bantuan sosial dan transfer ke daerah. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan kebutuhan pokok dan meningkatkan produktivitas pangan.

Pengelolaan Pembiayaan

Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara, maka defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen dari PDB). Besaran ini lebih rendah dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3 triliun dari outlook tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Sumber pembiayaan anggaran tersebut mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu, kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) diharapkan dapat tercapai melalui efisiensi pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran pada tahun 2018 diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penutup

Pemerintah tak pernah berhenti untuk melihat fakta di lapangan dari hasil pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, APBN 2018 disusun sedemikian rupa demi mendistribusikan pendapatan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. “APBN 2018 baru ditetapkan, kita harus fokus membangun APBN yang kuat dan efektif dalam mencapai target pembangunan. Bila ekonomi membaik dan fiskal makin kuat, maka saat ekonomi tidak stabil kita tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.



MENJAGA EKONOMI TERUS BERTUMBUH

Adalah impian bagi setiap negara untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya. Guna mencapai hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter yang paling strategis, di samping stabilitas pada sektor keuangan. Tidak hanya itu, penentuan terkait besaran asumsi pertumbuhan ekonomi, juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang. Termasuk, sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan fiskal, sehingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih kredibel.

Sepanjang 2012 hingga 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi pemulihan. Hal ini sebagai dampak dari krisis keuangan global pada 2009. Perlambatan ekonomi dunia, bahkan mencatatkan pertumbuhan terendah pada 2016, pasca terjadinya krisis keuangan global. Terjadinya tren penurunan harga komoditas dunia, kebijakan *taper tantrum* oleh Amerika Serikat, kebijakan *debt ceiling* oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, serta tren penurunan pertumbuhan Tiongkok, turut mempengaruhi kinerja ekonomi global.

Meski demikian, pada 2017 dan 2018, International Monetary Fund memperkirakan terjadinya perbaikan pada ekonomi global dengan kisaran pertumbuhan masing-masing sebesar 3,5 persen dan 3,6 persen. Pemulihan ekonomi ini, bersumber dari negara maju dan negara berkembang. Meski diprediksi membaik, prospek dari pertumbuhan ekonomi global masih belum bisa kembali pada tingkat seperti sebelum terjadinya krisis.

Tidak dapat dipungkiri, krisis keuangan global yang terjadi pada 2008-2009 memang berdampak serius pada sejumlah sektor. Mulai dari lemahnya permintaan global, pengetatan kredit, merosotnya pertumbuhan investasi, rendahnya pertumbuhan produktivitas, serta faktor demografi yang turut menghambat prospek ekonomi global.

Di tengah kondisi perekonomian global yang juga mempengaruhi perekonomian domestik, pemerintah tidak berhenti mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya terkait keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018.

“Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif, agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata,” kata Menkeu.

Proyeksi pertumbuhan dalam APBN

Menkeu menyadari, sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang sangat penting, APBN harus terus dirancang dan diarahkan agar kredibel dan fleksibel,

sehingga efektif dalam mengelola dan menjaga perekonomian. Sejalan dengan itu, dalam APBN maupun APBN Perubahan (APBN-P), pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak henti berupaya untuk menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang realistis dan kredibel. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan segala potensi dan risiko ekonomi ke depan.

Penyesuaian asumsi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam APBN-P dilakukan guna mengantisipasi dampak risiko terhadap postur anggaran. Meski dalam perencanaan asumsi anggaran masih terdapat deviasi antara APBN dengan realisasinya, akan tetapi tren deviasi tersebut terlihat semakin mengecil.

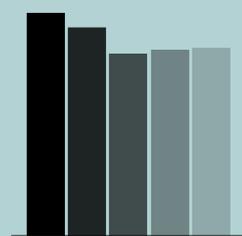
Konsumsi stabil, inflasi terjaga

Dalam laporan Dwi Bulanan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kepala BKF Suahasil Nazara menyampaikan, sinyal penguatan ekonomi terus berlanjut. Diakui Suahasil, kesuksesan dalam pelaksanaan program Amnesti Pajak yang berakhir pada 31 Maret, menandai momentum penguatan kebijakan fiskal ke depan. Kondisi makro dan fiskal yang sehat ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui langkah-langkah reformasi yang terus berjalan.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2017 mencapai 5,01 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 4,90 persen. Selanjutnya pertumbuhan



Pertumbuhan Ekonomi



- 2012: 6 persen
- 2013: 5,6 persen
- 2014: 4,9 persen
- 2016: 5,0 persen
- 2017: 5,06 persen (triwulan III)

Ease of Doing Business:

Naik **15** peringkat (dari posisi 106 ke posisi 91)

Investment Grade

dari seluruh lembaga rating (S&P, Moody's, dan Fitch)

Global Competitiveness Index 2017-2018:

Naik **5** peringkat (dari posisi 41 ke posisi 36)

Galup World Poll:

Indonesia dan Swiss => Predikat Negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah.

ekonomi nasional terus stabil pada triwulan kedua dan ketiga. Pada triwulan kedua, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01 persen. Kemudian membaik hingga triwulan ketiga sebesar 5,06 persen.

Perbaikan pada pertumbuhan ekonomi nasional sesungguhnya telah mulai ditunjukkan pada 2016.

Hal ini didukung oleh tingkat konsumsi dan tingkat inflasi yang terjaga. Diketahui hingga Oktober 2017, tingkat inflasi yang terjadi sebesar 3,58 persen (yoy).

Sementara itu, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh sebesar 4,93 persen dan masih mendominasi struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 55,68 persen.

Pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga menandai masih sehatnya daya beli masyarakat secara umum. Selain didukung oleh kebijakan stabilitas inflasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap kebutuhan barang pokok oleh pemerintah, sejumlah program bantuan sosial juga membantu pertumbuhan pada daya beli masyarakat lapisan bawah. Dengan demikian, pemerataan pendapatan antarmasyarakat dapat dicapai. Adanya gairah aktivitas dalam negeri turut pula didorong oleh adanya dampak *multiplier* atas pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kinerja ekspor impor

Pada triwulan pertama 2017, aktivitas perdagangan dan harga komoditas global yang membaik mendorong kinerja ekspor dan impor Indonesia yang secara umum menunjukkan tren perbaikan positif. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat pada 2012-2016 merupakan masa yang cukup berat bagi kinerja ekspor dan impor Indonesia yang terus mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik mempublikasikan peningkatan nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2017 sebesar 18,39 persen (yoy). Sementara nilai impor meningkat 23,3 persen (yoy). Kinerja ekspor dan impor masih menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dalam komponen PDB dari sisi pengeluaran.

Pengakuan dan capaian

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum menentu, Indonesia justru memperoleh berbagai pengakuan atas reformasi ekonomi dan struktural. Terkait Ease of Doing Business. Tahun 2017, misalnya, Indonesia berhasil naik 15 peringkat ke posisi 91. Hal ini membuat Indonesia masuk dalam jajaran Top Improvers berada di atas India, Brazil, dan Filipina. Selain itu, kabar menggembirakan juga datang melalui Global Competitiveness Index 2017-2018 yang menaikkan peringkat Indonesia sebanyak 5 peringkat,

dari posisi Indonesia dari 41 menjadi 36.

Hal yang tak kalah menggembirakan, lembaga rating Standard and Poor's (S&P) juga memberikan peringkat layak investasi (*investment grade*) terhadap Indonesia. Hal ini melengkapi pencapaian Indonesia sebagai negara layak investasi yang sebelumnya telah diperoleh dari sejumlah lembaga rating lain, seperti Fitch, Moody's, Japan Credit Rating, dan Rating and Investment. Tidak samapai di situ, sejumlah lembaga rating tersebut bahkan telah meningkatkan *outlook* Indonesia dari stabil menjadi positif.

Layak investasi

Salah satu indikator yang digunakan S&P untuk memberikan peringkat layak investasi adalah adanya penilaian fiskal terhadap pengelolaan beban utang (*debt burden*). Dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jumat (19/5), Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa peningkatan peringkat utang dipengaruhi oleh hasil kinerja APBN dan belanja produktif. “Kinerja dari APBN atau kebijakan fiskal dianggap mengalami perbaikan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi belanja maupun penerimaan,” ujar Menkeu.

Peringkat kredit merupakan salah satu acuan bagi para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi dan sering menjadi tolok ukur perbandingan kinerja ekonomi antara negara yang satu dengan negara lainnya. Pemberian

peringkat ini dilakukan oleh lembaga pemeringkat independen terkait risiko kredit yang dinilai lewat kemampuan suatu entitas dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengungkapkan, kenaikan level ini menjadi penanda bahwa tingkat kepercayaan terhadap suatu negara meningkat, sehingga investor berpeluang memindahkan dana dari instrumen investasi jangka pendek ke instrumen jangka panjang.

Sementara Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness, Eric Sugandhi, mengatakan, peringkat *investment grade* yang diperoleh Indonesia dari semua *rating agencies* terkemuka membuka peluang untuk menarik lebih banyak dana asing ke pasar finansial.

Kebijakan lanjutan

Guna menjaga momentum yang baik ini, Chief Economist Mandiri, Anton Hermanto Gunawan, menjelaskan Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan levelnya di tahun depan. Namun di sisi lain, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah risiko yang berpotensi menurunkan peringkat. Salah satunya dengan mengelola tekanan-tekanan yang berpengaruh terhadap *macroeconomics stability* yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar ke depan. Hingga saat ini, dia menilai kondisi makroekonomi Indonesia masih cukup kredibel.

SEMUA DEMI PENERIMAAN NEGARA

Tak bisa dipungkiri pajak berperan vital untuk mendanai pembangunan negara. Namun rendahnya penerimaan dan rasio pajak Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Segala aspek yang bisa mendukung jalannya kesadaran dan kepatuhan perpajakan perlu terus dibenahi. Berikut highlight seputar perpajakan Indonesia sepanjang 2017.

Keseluruhan periode program amnesti pajak resmi berakhir tanggal 31 Maret 2017. Meski belum mencapai target, program yang bergulir selama 9 bulan ini berjalan baik. Pemerintah berhasil mengumpulkan kurang lebih 950 ribu surat pernyataan harta dengan aset 4800 triliun. Sementara dana segar yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp147 triliun dari target Rp165 triliun.

Animo masyarakat sangat tinggi, terlihat dari panjangnya antrean di kantor-kantor pelayanan pajak. Artinya banyak orang yang percaya terhadap program ini dan tergerak untuk berpartisipasi. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

“Deklarasi harta dan uang tebusan dan repatriasi dari amnesti pajak kita manfaatkan untuk infrastruktur dan membangun ekonomi Indonesia agar makin maju dan makin mandiri. Infrastruktur, sekolah, rumah sakit, membantu usaha kecil dan mengentaskan kemiskinan di desa, di kota, di perbatasan Indonesia. Pajak adalah sumber daya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia,” kata Menkeu.

Amnesti pajak telah dimulai sejak 1 Juli 2016 sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. UU ini memberi keringanan dan

pengampunan bagi para penunggak pajak. Pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana. Caranya adalah dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Program amnesti pajak dibagi menjadi tiga periode yang masing-masing berjalan tiga bulan. Besarnya uang tebusan berbeda-beda di tiap periode. Pada periode pertama, untuk deklarasi dalam negeri nilai yang harus dibayar hanya 2 persen dari total pajak yang seharusnya dibayarkan. Sementara, untuk deklarasi luar negeri jumlah uang tebusannya sebesar 4 persen.

Pada periode kedua, besaran uang tebusan menjadi 3 persen untuk deklarasi dalam negeri, dan 6 persen untuk deklarasi luar negeri. Dan pada periode terakhir uang tebusan menjadi 5 persen untuk deklarasi dalam negeri dan 10 persen untuk dana luar negeri.

Reformasi Perpajakan

Sedikit banyak program amnesti pajak berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negeri. Selain itu, amnesti pajak juga menjadi langkah awal reformasi perpajakan.

Menkeu menuturkan, reformasi perpajakan meliputi perbaikan aturan dan perundang-undangan, perbaikan organisasi dan proses bisnis, perbaikan

“Deklarasi harta dan uang tebusan dan repatriasi dari amnesti pajak kita manfaatkan untuk infrastruktur dan membangun ekonomi Indonesia agar makin maju dan makin mandiri. Infrastruktur, sekolah, rumah sakit, membantu usaha kecil dan mengentaskan kemiskinan di desa, di kota, di perbatasan Indonesia. Pajak adalah sumber daya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia,”

Srimulyani Indrawati
Menteri Keuangan

sumber daya manusia, hingga perbaikan sistem informasi dan basis data. Reformasi pada tubuh DJP mutlak diperlukan mengingat budaya membayar pajak masih perlu terus dibangun.

Sebab itu, akhir tahun 2016 Menkeu melalui KMK Nomor 885 tahun 2016 membentuk Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai. “Mereformasi DJP untuk menjadi institusi yang disegani, dihormati, dan dipercaya adalah perjalanan yang harus terus diupayakan,” katanya dalam salah satu seminar amnesti pajak ‘Jembatan Penyelesaian Masa Lalu dan Gerbang *Tax Reform*’ di Jakarta awal tahun 2017 lalu.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana, Suryo Utomo menjelaskan, reformasi ini berangkat dari *tax ratio* yang cenderung menurun dari tahun ke tahun sedangkan tuntutan dari pembangunan bertambah. DJP harus melakukan pembenahan.

Tim reformasi dibentuk untuk mendesain peta permasalahan dan memformulasikan segala sisi yang perlu segera ditangani. Tentu saja DJP tidak dapat berjalan sendiri. Sebab itu, tim reformasi perpajakan melibatkan akademisi, praktisi, tenaga ahli, Komite Pengawas Perpajakan, serta pelaku usaha dan wartawan. Mereka bertugas sebagai tim *advisor* dan *observer*. “Dari wartawan misalnya, kami ingin mengetahui pandangan publik terhadap DJP,” kata Suryo.

Sementara itu, pengamat perpajakan diharapkan dapat memberikan perspektif sesuai keahliannya. Misalnya saja tentang perbaikan sistem perpajakan, termasuk perbandingan sistem perpajakan di berbagai negara lain. “Penerimaan pajak pun memerlukan kepatuhan WP. Reformasi ini menjadi penting agar wajib pajak juga memiliki kepercayaan dalam menjalankan kewajibannya,” lanjut Suryo

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo yang juga anggota tim *advisor* mendukung langkah tersebut. Menurut Yustinus, selama ini reformasi perpajakan selalu dilakukan secara parsial. Untuk meningkatkan *tax ratio* menjadi 15 persen pada 2020 Yustinus mendorong dikeluarkannya pendekatan kepada masyarakat.

Yustinus mengapresiasi upaya DJP meningkatkan kemudahan pelaporan pajak melalui *e-filing*. “Digitalisasi baik, tapi tidak cukup. Program terobosan yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan integrasi data. Setelah data terkumpul, DJP harus tahu apa yang akan dilakukan dengan data itu,” kata Yustinus.

Selain itu, Yustinus juga akan membawa usulan agar DJP melakukan pendekatan secara interdisipliner atau dari berbagai sisi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan. Hal yang tak kalah penting menurutnya adalah perlunya mengukur literasi pajak masyarakat. DJP dapat



Latar Belakang Kebijakan AEoI (Sumber Ditjen Pajak)

- Tingkat kepatuhan rendah terkait transaksi lintas negara;
- Terbatasnya kapasitas otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak (WP);
- EoI on Request dan Spontaneous EoI dirasa belum efektif untuk mengawasi kepatuhan WP Multinational Enterprises dan High Wealth Individual Tax Payer.

Data yang dipertukarkan (Sumber: Perppu No.1 Tahun 2017)

- Identitas pemegang rekening keuangan;
- Nomor rekening keuangan;
- Identitas lembaga jasa keuangan;
- Saldo atau nilai rekening keuangan;
- Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Manfaat Kebijakan AEoI bagi Negara Berkembang

- Deteksi penghindaran pajak dan harta kekayaan di luar negeri
- Pencegahan ketidakpatuhan WP di masa depan
- Mendukung sinergi di lingkungan domestik
- Meningkatkan reputasi

mengukurnya dengan berangkat dari data bahwa para peserta amnesti pajak sebagian besar telah memiliki NPWP.

Modernisasi perpajakan salah satunya ditandai dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang handal. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP, Iwan Djuaniardi mengatakan, pajak berbicara mengenai fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Kombinasi ketiganya akan menghasilkan *compliance* yang berujung pada naiknya penerimaan pajak. Pemanfaatan TI dalam ketiga fungsi tersebut sudah menjadi keharusan agar sistem pepajakan bisa mengikuti perkembangan zaman. “Ibaratnya, kalau WP jalan pakai Ferrari, terus kita pakai bemo kan tidak akan terkejar,” ujar Iwan.

Dijelaskan Iwan lebih lanjut, ada empat pilar strategi TI perpajakan saat ini. Pertama, mobilitas agar WP bisa dilayani secara *online* kapan saja dari mana saja. Dengan begitu, WP akan lebih gampang untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Pilar kedua adalah *big data* atau pengolahan banyak data dalam beragam format. Dengan sistem pajak *self assessment*, DJP dapat lebih cepat mencocokkan laporan pajak dari WP dengan data yang sudah dianalisa.

Pilar ketiga adalah penggunaan komputasi awan untuk meningkatkan kapasitas pusat data perpajakan. Penyimpanan data bisa dilakukan lebih cepat dengan biaya rendah. Selain itu, Ditjen Pajak tidak perlu memikirkan infrastruktur karena komputasi awan cukup disewa dari penyedia jasa.

Pilar terakhir adalah *social business* agar TI pajak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis dan sosial WP. “Selain memudahkan WP, pilar ini juga membantu petugas pajak dalam melakukan analisis hubungan satu bisnis dengan bisnis lainnya, ujar Iwan

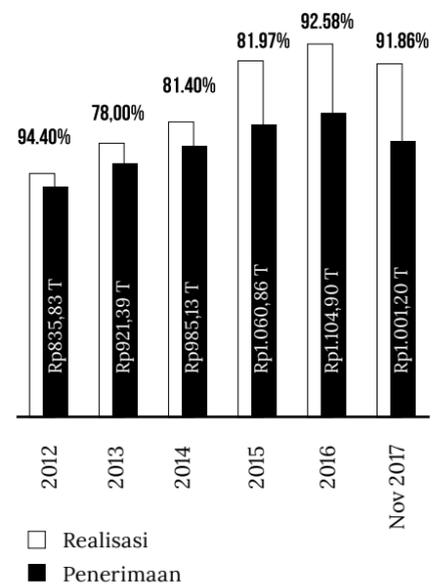
Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Keseriusan untuk menggenjot penerimaan pajak tak berhenti pada program amnesti pajak dan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Untuk kepentingan yang lebih besar pemerintah telah menetapkan Perppu No. 1 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

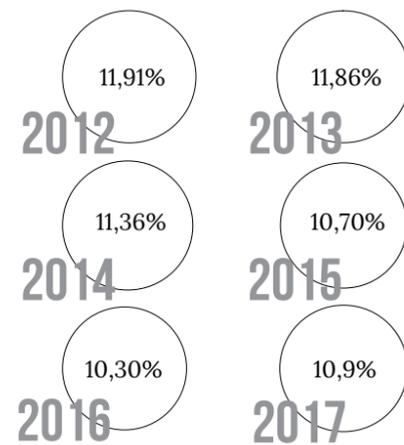
Indonesia bersama lebih dari 100 negara lain telah berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk kepentingan perpajakan. Pada inisiatif global yang diprakarsai oleh



Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2012-2017



Tax Ratio* Indonesia



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Pajak, LKPP 2007 Audited (Ditjen PBN), LKPP 2008 Audited (Ditjen PBN) *tax ratio dalam arti sempit

OECD dan G20 disepakati sebanyak 50 negara atau yurisdiksi akan melakukan AEOI pertama kali pada September 2017, sedangkan 50 negara atau yurisdiksi lainnya akan menerapkan pertama kali pada September 2018.

Menurut Menkeu tujuan AEOI adalah untuk menghilangkan ruang bagi para WP yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa negara yang terikat dalam perjanjian AEOI sering dianggap sebagai *tax haven*, seperti Hongkong, Singapura, Swiss, dan Australia. Keterlibatan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa era keterbukaan informasi keuangan sudah di depan mata. “Kalau tidak ikut, maka Indonesia dirugikan karena tidak bisa mengakses informasi keuangan dari WP yang memiliki dana maupun aset di luar negeri,” ujar Menkeu.

Data nasabah yang dapat dipertukarkan dalam AEOI antara lain identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Meskipun informasi keuangan menjadi transparan, pemerintah berkewajiban menjaga agar data tersebut tidak disalahgunakan.

Yustinus mengimbau masyarakat untuk proporsional dalam merespons kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini justru memberikan rasa keadilan bagi WP yang telah dengan patuh membayar pajak, melaporkan seluruh hartanya, dan mengikuti amnesti pajak.

Terhadap WP yang mengikuti amnesti pajak, Yustinus mengusulkan agar diberi kelonggaran, misalnya berupa himbuan untuk melengkapi

data perpajakannya agar terhindar dari sanksi denda. “Ini adalah saat yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma menuju era keterbukaan,” ujarnya.

Pajak e-commerce

Indonesia tengah berada dalam situasi transformasi, dari konvensional menjadi digital ekonomi atau *e-commerce*. Secara jelas, terlihat konsumen sudah mulai beralih kepada transaksi daring, sehingga banyak ritel konvensional memutuskan untuk tutup. Hal ini disampaikan oleh Ketua Indonesia e-Commerce Association (idEA) bidang Ekonomi Bisnis, Ignasius Untung dalam Seminar Utama Hari Oeang pada Oktober lalu.

Menurut Untung, fenomena ini dikarenakan perubahan pola hidup masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi. Tidak hanya pada pusat perbelanjaan, hampir seluruh sektor sudah mulai menyediakan *platform* digital. Mulai dari sektor transportasi, hingga pembelian tiket pertunjukan. “Dunia *digital* ini satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan,” kata Untung.

Untung memaparkan, dari 262 juta penduduk Indonesia saat ini, sebanyak 51 persen sudah mengenal internet. Sementara 92 juta orang atau 35 persen sudah menggunakan telepon genggam. Untuk aktivitas *e-commerce*, sebanyak 48 persen penduduk Indonesia mencari informasi produk *online*, 46 persen mengunjungi toko *online*, dan 41 persen membeli produk *online*.

Mengenai aksesnya, sebanyak 34 persen membeli melalui komputer

dan sebanyak 33 persen membeli melalui telepon genggam. Jika secara keseluruhan, transaksi *e-commerce* Indonesia pembelinya sebanyak 24,74 juta atau 9 persen dari total populasi, maka total nilai transaksi yang mencapai USD5,6 miliar pada 2016 merupakan jumlah yang besar untuk sebuah industri baru.

Pemerintah juga melihat potensi penerimaan pajak dari sektor *e-commerce*. Dalam pernyataan pers usai menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF 2017 di Washington DC, Oktober lalu, Menkeu mengungkapkan pajak *e-commerce* menjadi salah satu topik yang paling menonjol.

Indonesia siap berpartisipasi untuk mengkaji lebih dalam perkembangan *e-commerce* dan potensi pajaknya bersama negara lainnya. Hal ini sangat relevan bagi Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan penerimaan pajak.

Hingga saat ini formulasi aturan pajak *e-commerce* sedang dalam tahap finalisasi dan akan diberlakukan pada 2018. Menkeu menyatakan, dengan aturan ini maka pengusaha *online* akan mendapatkan perlakuan pajak yang sama dengan pengusaha konvensional. “Artinya tidak ada satu kelompok membayar pajak yang dirugikan karena tidak samanya perlakuan pajak dari kegiatan-kegiatan tersebut,” ujar Menkeu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil mengatakan tidak ada jenis pajak baru untuk industri *e-commerce*. Ketentuan perpajakan untuk sektor ini nantinya akan lebih mengatur tata cara dan aturan main pengenaan pajak pada perusahaan *online* agar lebih efektif.



SERBA SERBI KETENTUAN BARANG BAWAAN PENUMPANG

Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam negeri merupakan proses impor barang. Lalu lintas barang yang beredar di wilayah NKRI perlu diawasi, guna melindungi masyarakat dan industri dalam negeri.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran gaya hidup di masyarakat, termasuk dalam hal konsumsi. Bagi banyak orang, berbelanja bukan sekadar membeli barang kebutuhan, tetapi juga sebuah pengalaman yang menyenangkan.

Meningkatnya jumlah kelas menengah membuat wisata belanja kian populer. Sudah biasa kita jumpai wisatawan Indonesia yang berpergian ke luar negeri sambil berbelanja. Setidaknya mereka akan membawa oleh-oleh khas negara yang dikunjungi.

Hobi belanja tentu sah-sah saja. Namun perlu disadari bahwa membawa barang dari luar negeri, meski untuk keperluan pribadi, juga termasuk kegiatan impor. Sebab itu, agar dapat membawa barang dari luar negeri dengan nyaman, alangkah baiknya bila kita semua memahami ketentuan barang bawaan penumpang yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan Barang Bawaan

Aturan seputar barang bawaan penumpang sudah berlaku sejak tahun 2010. Namun, ketentuan ini kembali menjadi sorotan paska viralnya video petugas bandara yang sedang memeriksa barang bawaan penumpang pada pertengahan tahun lalu. Dalam video tersebut, tampak petugas mendapati pasangan suami istri yang membawa barang belanjaan dari luar negeri berupa tas mewah.

Nilai tas tersebut melebihi batas yang dipersyaratkan agar bisa bebas dari pengenaan bea masuk barang impor.

Meski digunakan untuk keperluan pribadi, namun barang tersebut tetap dikenakan bea masuk dan ketentuan sesuai ketentuan.

Tak urung, video tersebut menjadi perbincangan berbagai elemen masyarakat. Ada yang memaklumi dan menganggap bea masuk wajar saja, ada pula yang merasa keberatan lantaran barang yang dibelinya hanya untuk penggunaan pribadi. Selain itu, nilai batas barang yang dikenakan bea masuk dianggap sudah tidak sesuai perkembangan zaman.

Sebenarnya pemerintah memiliki aturan yang jelas terkait barang bawaan penumpang. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

Pada dasarnya, barang bawaan penumpang dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, barang bawaan penumpang yang bukan termasuk barang dagangan. Misalnya barang untuk keperluan pribadi selama di perjalanan, barang yang dibeli atau diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa lagi keluar negeri. Kedua, adalah barang dagangan yaitu barang yang menurut jenis, sifat, dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk tujuan diperjualbelikan, barang contoh, bahan baku, dan/atau barang yang akan digunakan untuk selain tujuan pribadi.

Untuk kedua barang tersebut, penumpang wajib menyampaikan barang impor yang dibawanya kepada petugas

“Selain harus melindungi industri dalam negeri, DJBC juga bertugas melindungi masyarakat dari masuknya barang larangan atau pembatasan, bahkan dari bahaya narkoba, psikotropika, dan precursor (NPP) yang sering menggunakan jalur barang penumpang untuk masuk ke Indonesia.”

Heru Pambudi
Direktur Jenderal
Bea dan Cukai

bea dan cukai dengan menggunakan pemberitahuan *customs declaration* (CD) untuk barang pribadi penumpang dan pemberitahuan impor barang (PIB) untuk barang dagangan.

Barang pribadi penumpang akan dibebaskan dari bea masuk dan cukai apabila nilainya tidak melebihi USD250 per orang pribadi atau USD1.000 per keluarga. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) hanya akan dikenakan jika barang bawaan tersebut nilainya melebihi batasan yang dipersyaratkan.

Adapun jenis dan jumlah barang bawaan yang dibebaskan dari bea masuk dan cukai adalah 25 batang cerutu, 200 batang sigaret, 10 gram tembakau iris, dan 1 liter minuman alkohol. Jika barang yang dibawa melebihi jumlah yang ditentukan, maka kelebihannya akan langsung dimusnahkan oleh DJBC dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

Kaji Ulang Nilai Batas

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjelaskan, mengawasi barang bawaan penumpang merupakan salah satu fungsi DJBC sebagai *industrial assistance dan community protector*. Tujuan dari ketentuan impor barang bawaan penumpang adalah memberi prinsip keadilan dan perlindungan industri dalam negeri.

Jika barang bawaan penumpang dengan nilai batas tertentu tidak dikenakan bea masuk dan pajak, sedangkan barang produksi dalam negeri dikenakan pajak, maka industri dalam

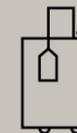
negeri tidak akan dapat bersaing dari sisi harga.

“Selain harus melindungi industri dalam negeri, DJBC juga bertugas melindungi masyarakat dari masuknya barang larangan atau pembatasan, bahkan dari bahaya narkoba, psikotropika, dan precursor (NPP) yang sering menggunakan jalur barang penumpang untuk masuk ke Indonesia,” kata Heru.

Dijelaskan Heru lebih lanjut, pengenaan batas barang pribadi penumpang yang diberikan pembebasan, atau dikenal dengan istilah *de minimus value*, merupakan salah satu praktik yang lazim di dunia internasional. Sesuai standar yang dibarekomendasikan *World Custom Organization* (WCO) berdasarkan *The Revised Kyoto Convention*, *de minimus value* dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, Nasruddin Djoko menambahkan, nilai batasan di setiap negara berbeda-beda. Konsep *de minimus value* tidak hanya berlaku untuk barang impor yang dibawa penumpang maupun kiriman, melainkan juga bagi negara perbatasan. “Kan kita punya perbatasan dengan Malaysia, Filipina, Papua Nugini, maupun Timor Leste. Itu *de Minimus*-nya beda-beda,” kata Djoko.

Meski begitu, Heru mengatakan bahwa pemerintah berencana menyesuaikan nilai *de minimus value*. “Beberapa dasar pertimbangannya antara lain komparasi dengan negara-negara lain, nilai barang penumpang berdasarkan *custom declaration* pada beberapa



Nilai Pabean Barang Pribadi Penumpang (Kecuali Untuk barang dagangan)

- Maksimal *Free On Board* (FOB) USD250 per orang
- Maksimal *Free On Board* (FOB) USD 1000 per keluarga

Perhitungan

- Terhadap barang impor yang dibawa penumpang, berlaku ketentuan impor dimana atas barang tersebut terhutang Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) PDRI = PPN + PPH Pasal 22 + Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

bandara utama, dasar perhitungan bea masuk dan pajak, serta perhitungan *Consumer Index Price* dan *Gold Index Price*,” ungkap Heru.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Erwin Situmorang mengatakan, ada dampak lain dari adanya peningkatan lalu lintas orang dari dan/ atau ke luar negeri. Salah satunya adalah adanya potensi peralihan jasa borongan, yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai barang dagangan, menjadi barang bawaan pribadi penumpang untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Tanggapan Dunia Usaha

Menanggapi hal tersebut, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

terima kasih

Kementerian Keuangan meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 untuk Kategori Badan Publik Kementerian tahun 2017. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). KIP memberikan apresiasi kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik yang berhasil menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya.



Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan kami. Kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik.

Lapor ke Petugas Bea dan Cukai apabila membawa



Ikan - Hewan - Tumbuhan - Barang Dagangan - Obat - Senjata/amunisi/bahan peledak - Benda/publikasi pornografi - Film, pita video rekaman, video laser disc, piringan hitam/vinyl

Hariyadi Sukamdani mengatakan, penentuan nilai batas barang bawaan penumpang yang adil harus dilakukan berdasarkan riset yang benar sesuai kondisi saat ini. Dengan begitu, aturan ini tidak membuat penumpang merasa diperangkap dan malah membuat keributan baru di bandar udara. “Kalau barang yang dibawa memang mencolok seperti tas senilai Rp200 juta, okelah harus ada justifikasi. Tetapi kalau misalnya hanya sekedar telepon genggam senilai Rp10 juta, menurut saya menjustifikasinya harus lebih bijak,” ujar Hariyadi.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta menambahkan, melindungi industri dalam negeri sebenarnya bisa dengan jalan lain, misalnya dengan menentukan regulasi yang membuat industri menjadi lebih efisien.

Tutum mencotohkan, ada pengusaha ritel yang membuka keagenan dan distributor salah satu produk telepon seluler. Namun, aturan yang ada membuat verifikasi usahanya membutuhkan waktu yang lama sehingga barang tersebut baru masuk Indonesia dua periode berikutnya. “Kalau begitu ya orang berbondong-bondong mencarinya di luar negeri,” kata Tutum. “Kalau industri dalam negeri dari hulu ke hilir sudah punya segalanya, siapa yang mau belanja di luar negeri? Apalagi jika harganya kompetitif dan produknya sudah yang terbaru,” katanya.

Tutum menuturkan, sebagai pengusaha ritel ia merasa sudah dilindungi berkali-kali dan tidak keberatan jika batas nilai barang bawaan penumpang disesuaikan. Menurutnya, pengawasan barang

bawaan penumpang menyangkut banyak sektor, sehingga bisa jadi berlebihan jika hanya ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri. “Saya harus rasional. Beli satu sepatu olahraga saja kan sudah sekitar Rp2 juta. Selain itu, jika ada barang kebutuhan pribadi yang tidak tersedia di Indonesia, saya juga harus memahami kesulitan orang,” tuturnya.

Untuk kenyamanan setiap pihak, Hariyadi mengusulkan untuk dibuat semacam pencatatan uang dan barang masuk dan keluar. Catatan tersebut kemudian disesuaikan dengan profil penumpang dan SPT tahunannya. “Prinsipnya masyarakat membayar PPh pribadi. Kalau kemudian dia mau belanja itu urusan pribadinya, *dong*. Kalau jumlahnya tidak masuk akal untuk keperluan pribadi dan penghasilannya, baru kita saring lagi,” ujar Hariyadi. “Selain menghindari pungutan liar dan keributan yang tidak perlu, negara juga tidak akan kehilangan profil Wajib Pajak yang sebenarnya, ujar Hariyadi.

Kategori Barang Penumpang

Barang tidak langsung

Maksimal 15 hari setelah penumpang tiba
Maksimal 30 hari sebelum kedatangan penumpang

Barang bawaan tangan

Maksimal barang bebas bea masuk
1 liter minuman beralkohol
200 batang sigaret
25 batang cerutu
100 gram tembakau



INFRASTRUKTUR BANGUN PELOSOK NEGERI

Gairah pembangunan infrastruktur tampak di seluruh penjuru negeri. Keteringgalan Indonesia pada infrastruktur selama ini, khususnya yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur dasar, terus dikejar. Janji pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, mulai membuahkkan hasil.

Dalam waktu tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, geliat pembangunan mulai dapat dirasakan di mana-mana. Bukan hanya berpusat di Pulau Jawa, melainkan tersebar di seluruh pelosok negeri. Semangat membangun dari pinggiran yang diusung Presiden Jokowi benar-benar komitmen dilaksanakan.

Kebutuhan mendesak

Kebutuhan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur memang sudah saatnya dipenuhi. Pada 2014 saja, Indonesia berada pada fase krisis infrastruktur di mana biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini, diketahui paling tinggi di kawasan Asia Tenggara (Bank Dunia, 2013).

Selain itu, Global Competitiveness Index tahun 2014-2015 menyebutkan penyediaan infrastruktur di Indonesia masih berada pada peringkat 56 dari 144 negara. Jauh berada di bawah Singapura yang menempati peringkat ke-2, serta Malaysia yang menempati peringkat ke-25. Laporan ini mengindikasikan bahwa infrastruktur Indonesia belum bisa mendongkrak potensi daya saing Indonesia secara keseluruhan.

Padahal pada 2025 mendatang, kajian Goldman Sachs Global Investment Research tahun 2009 memprediksi adanya peningkatan pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai USD14.900 (peringkat ke-12 dunia). Dengan demikian, Indonesia akan masuk sebagai negara dengan kategori high income country pada 2025. Namun, hal ini hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan didukung oleh perkembangan penyediaan infrastruktur.

Kejar ketertinggalan

Keterbatasan anggaran selama ini memang menjadi alasan bagi pemerintah untuk membatasi pembangunan infrastruktur dalam negeri. Ketimpangan dalam hal pembangunan berdampak pula pada ketimpangan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Keterbatasan akses dan konektivitas mengakibatkan terjadinya disparitas harga yang cukup tinggi antar wilayah, serta menjadi ganjalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata.

Terkait hal ini, Direktur Penyusunan APBN, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal saat itu, Parjiono, mengungkapkan alasan dibalik rendahnya kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Selama ini kondisi pertumbuhan kita (di kisaran) 5-7 persen, tidak bisa lebih. China bahkan bisa tumbuh dua digit. Itu karena ruang tumbuh mereka besar (dengan) didukung oleh infrastruktur yang cukup," terang Parjiono.

Dia melanjutkan, infrastruktur yang dimaksud meliputi sistem logistik, transportasi, irigasi pertanian, dan sebagainya. "Dengan infrastruktur yang cukup, maka ruang tumbuh bisa menjadi besar. Indonesia saat ini semacam shortage, ada ketidakseimbangan karena infrastruktur yang tersedia sudah tidak lagi mencukupi dengan kondisi saat ini. Shortage itu, dalam hal ini (adalah) ketimpangan. Makanya kita harus mengejar infrastruktur," jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Penyusunan APBN (PAPBN) Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta Wibawa menjabarkan penyebab ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur selama ini. "Sejak krisis ekonomi tahun 1998, kita berhenti (fokus pada infrastruktur) karena memang *fiscal space* kita kurang, sehingga (pada saat itu) kita mendorong (anggaran) ke arah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat," papar Kunta.

Besaran subsidi yang berada di atas Rp300 miliar yang terjadi hingga 2014, lanjut Kunta, membuat pemerintah 'keteteran' dalam membangun

infrastruktur. Akibatnya, keterbatasan pada infrastruktur menjadi penyebab bagi sulitnya pergerakan dan mobilitas barang, sehingga timbul high cost economy dan inefisiensi. Bahkan diantara negara Anggota ASEAN, Indonesia diketahui sudah jauh tertinggal.

Strategi giatkan pembangunan

Sebagai solusi atas defisit infrastruktur yang terjadi dalam negeri, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN tersebut, terdapat lima isu strategis yang terkait dengan infrastruktur Indonesia. Pertama, peningkatan infrastruktur dasar. Kedua, peningkatan ketahanan air, pangan, dan energi. Ketiga, penguatan konektivitas nasional. Keempat, pengembangan transportasi massal perkotaan. Kelima, peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan serta penyediaan infrastruktur.

Dari target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menetapkan 245 proyek ditambah dengan 2 program sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015. Keseluruhan proyek ditargetkan dapat diselesaikan pada 2019 mendatang. Dalam PSN tersebut, terdapat lima sektor dengan investasi tertinggi, yaitu sektor energi, ketenagalistrikan,

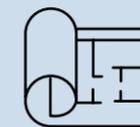
jalan, kereta, serta kawasan. Tidak main-main, nilai investasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan PSN ini tidak kurang dari Rp4.197 triliun.

Dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyumbang Rp525 triliun rupiah. Untuk itu, pemerintah menggandeng swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk ikut ambil bagian dalam proyek pembangunan ini. Komposisi peran swasta dan BUMN masing-masing sejumlah Rp2.414 triliun dan Rp1.258 triliun.

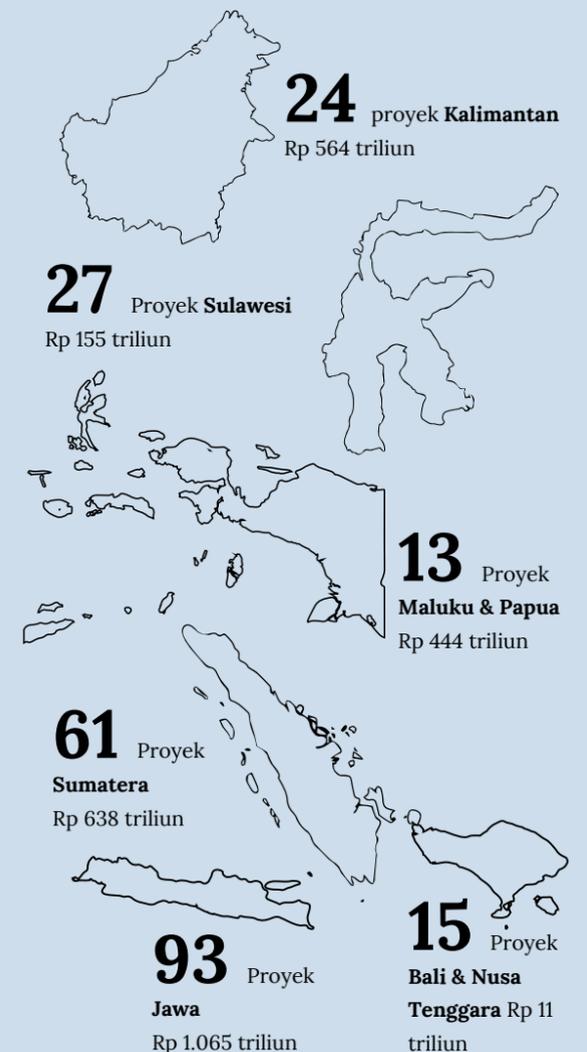
Infrastruktur dalam APBN

Menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam APBN, pemerintah telah melakukan kebijakan pemotongan pada belanja nonproduktif. Salah satunya pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Melalui langkah ini, pemerintah memiliki alokasi anggaran yang lebih besar guna membiayai pembangunan infrastruktur. Pemerintah sepenuhnya menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk itu, di samping menggunakan anggaran negara, pemerintah juga mengupayakan berbagai sumber dan skema pembiayaan pembangunan.

Dalam APBN, alokasi anggaran untuk infrastruktur memang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, misalnya, alokasi terkait infrastruktur mencapai Rp290,3



Program Strategis Nasional



Nilai Investasi PSN Rp4.197 triliun
Swasta Rp2.414Triliun
BUMN/D Rp1.258Triliun
APBN Rp525 Triliun

“Sejak krisis ekonomi tahun 1998, kita berhenti (fokus pada infrastruktur) karena memang fiscal space kita kurang, sehingga (pada saat itu) kita mendorong (anggaran) ke arah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat,”

Kunta Wibawa
Direktur
Penyusunan APBN
(PAPBN) Direktorat
Jenderal Anggaran

triliun dari sebelumnya sebesar Rp177,9 triliun pada 2014. Selanjutnya pada 2017, anggaran infrastruktur kembali naik menjadi Rp387,3 triliun, dari sebelumnya Rp317,1 triliun pada 2016.

Gandeng BUMN dan swasta

Menyikapi besarnya kebutuhan akan anggaran infrastruktur, Direktur PAPBN, Kunta Wibawa menjelaskan bahwa tidak mungkin semua pembiayaan infrastruktur berasal dari APBN. Oleh karena itu, pemerintah mendorong partisipasi dari BUMN dan swasta untuk mengisi kekurangan tersebut melalui berbagai skema kerja sama.

Terkait hal ini, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal saat itu, Parjiono mengungkapkan hal senada. “Makanya di pemerintah ada banyak skema atau instrumen untuk keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya ada PT SMI untuk pendanaan infrastruktur, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), PT SMR, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” katanya.

Parjiono melanjutkan, “Meski pemerintah tidak secara langsung berada dalam posisi yang mengeksekusi, akan tetapi tangan-tangan pemerintah yang dijadikan arms-nya yang akan terlibat.” Dalam menggandeng BUMN, selain melalui skema Public Private Partnership (PPP), pemerintah juga memberikan penanaman modal negara kepada BUMN. Fungsinya untuk meningkatkan struktur keuangan BUMN.

“Jadi bukan dikasih uang 100, lalu dibelanjakan untuk membangun infrastruktur (juga) 100, melainkan dimasukkan ke struktur (keuangan)

BUMN. Dengan demikian, posisi keuangannya jadi bagus dan bisa men-generate sumber dari luar,” jelasnya. Melalui langkah tersebut, keterlibatan swasta dan BUMN dalam mencapai target anggaran infrastruktur, diharapkan bisa terpenuhi.

Tarik minat

Sementara itu, guna mendorong peran swasta agar mau berpartisipasi lebih jauh, Kunta menjelaskan, salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran LMAN. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menyediakan atau menjamin ketersediaan tanah. Dengan demikian, saat membangun infrastruktur, pihak swasta maupun BUMN tidak terkendala risiko kepemilikan. Hal ini dilakukan terutama karena tingginya risiko proyek infrastruktur yang disebabkan oleh kenaikan harga tanah sejak awal.

Dalam APBNP 2017, misalnya, pemerintah memberikan tambahan penyertaan modal kepada LMAN guna penggantian tanah. “Kita tambah PMN (penyertaan modal negara) untuk LMAN sekitar Rp 12,1 triliun. Jadi totalnya Rp32,1 triliun untuk mendukung penggantian tanah”, jelasnya.

Chief Economist Bank Mandiri, Anton Hermanto Gunawan, menilai positif upaya pemerintah terkait masalah pembebasan lahan ini. Menurutnya, pemerintah saat ini sudah cukup baik dengan membuat land bank melalui LMAN untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, Anton turut menjelaskan bahwa sektor perbankan bisa menjadi salah satu alternatif untuk pembiayaan infrastruktur. Misalnya dengan mendukung pendanaan melalui capital market atau langsung pendanaan ke project based-nya. Hal ini diketahui telah dilakukan oleh beberapa BUMN.

Selain itu, dia juga menjelaskan beberapa kendala dalam membeli obligasi atau securities dari suatu proyek infrastruktur. Misalnya dalam hal pembangunan jalan tol baru yang memiliki jangka waktu yang panjang, tingkat ketidakpastian yang tinggi, serta permasalahan yang berhubungan dengan land clearing.

Program Strategis Nasional

Sebagaimana diketahui, dari target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019, penetapan 245 proyek ditambah dengan 2 program sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tercantum dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015.

Selanjutnya, pada 2017 melalui Perpres Nomor 58, dilakukan evaluasi atas kelayakan dan perkembangan PSN. Perhitungan proyek sudah selesai adalah sebanyak 20 Proyek, sedangkan

proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN adalah sebanyak 15 proyek. Lalu, sebanyak 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi PSN. Dengan demikian, total daftar PSN menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang.

Meski proyek masih lebih besar dilaksanakan di kawasan barat Indonesia, secara bertahap pemerintah menambah komposisi proyek infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Berdasarkan laporan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo yang bersumber dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terlihat sebaran pembangunan infrastruktur di seuruh Indonesia.

Mulai dari Sumatera (61 proyek), Jawa (93 proyek), Kalimantan (24 proyek), Sulawesi (27 proyek), Bali dan Nusa Tenggara (15 proyek), serta Maluku dan Papua (13 proyek). Selanjutnya, terdapat 2 program nasional dan 12 proyek nasional yang tersebar di seluruh Indonesia.

KPPIP dalam laporannya menjabarkan capaian pembangunan infrastruktur hingga semester pertama 2017. Dari seluruh target, sebanyak 26 PSN dari berbagai sektor telah berhasil dirampungkan dengan nilai investasi mencapai Rp47 triliun.

Reformasi untuk percepatan

Setidaknya terdapat tiga hal yang direformasi pemerintah

guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur. Pertama, reformasi fiskal yang meliputi viability gap funding, land revolving fund, availability payment, serta panduan dalam mitigasi risiko proyek PPP yang diterbitkan PT. PII.

Dalam vialibilty gap funding, pemerintah memberi fasilitas untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek dengan memberikan kontribusi pada biaya konstruksi maksimal 49 persen. Selanjutnya terkait land revolving, pemerintah memberikan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol sebagai dana talangan untuk percepatan pengadaan tanah yang berasal dari APBN. Untuk availability payment, terdapat skema pembayaran ketersediaan layanan oleh pemerintah selama masa konsensi setelah aset selesai dikerjakan oleh pihak swasta, sehingga proyek memenuhi persyaratan Bank.

Hal kedua yang dilakukan pemerintah adalah dengan mereformasi institusi. Baik KPPIP, PT. PII, PT. SMI, BLU LMAN, serta PPP Unit. Langkah ketiga adalah dengan mereformasi peraturan yang berlaku. Meliputi aturan terkait direct lending bagi BUMN guna percepatan proses penyediaan dana proyek, aturan terkait upaya percepatan pengadaan tanah, serta deregulasi kebijakan dan aturan melalui sejumlah paket kebijakan ekonomi.

5 Sektor Dengan Nilai Investasi Tertinggi:



ENERGI
12 Proyek
Rp 1.242 Triliun



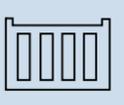
KETENAGA-
LISTRIKAN
1 Program
Rp 1.035 Triliun



JALAN
74 Proyek
Rp 684 Triliun



KERETA
23 Proyek
Rp 613 Triliun



KAWASAN
30 Proyek
Rp 290 Triliun

Pembangunan Kawasan Perbatasan

Jalan Perbatasan Kalimantan

Balai Karangan - Entikong - Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara

Total Panjang : 1.920,1 km

Jalan Tembus : 1.582 km

Jalan Belum Tembus : 337 km

Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur

Ruas Dafala - Nualain

Ruas Motamasin - Laktutus - Dafala

Ruas Haliwen - Sadi - Asumanu - Haekesak

Total Panjang : 176,2 km

Jalan Tembus : 151,1 km

Jalan Belum Tembus : 25,1 km

Jalan Perbatasan Papua

Segmen 1: Jayapura - Arso - Waris - Yetti

Segmen 2: Yetti - Ubrub - Oksibil

Segmen 3: Oksibil - Tanah Merah - Muting - Merauke

Total Panjang : 1.098,2 km

Jalan Tembus : 892,3 km

Jalan Belum Tembus : 205,9 km

MENDULANG CERITA DARI UJUNG DESA

Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, tiga tahun pula umur program Dana Desa. Sebagai amanat dari Undang-Undang Desa, Dana Desa menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk mencapainya, desa kini telah diubah perannya dari obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Tidak hanya itu, untuk memberdayakan potensi desa secara optimal dan berkelanjutan, Dana Desa perlu difokuskan tidak lagi sebatas untuk membangun desa, tetapi lebih diberdayakan agar bisa menjadikan desa yang membangun dirinya sendiri.

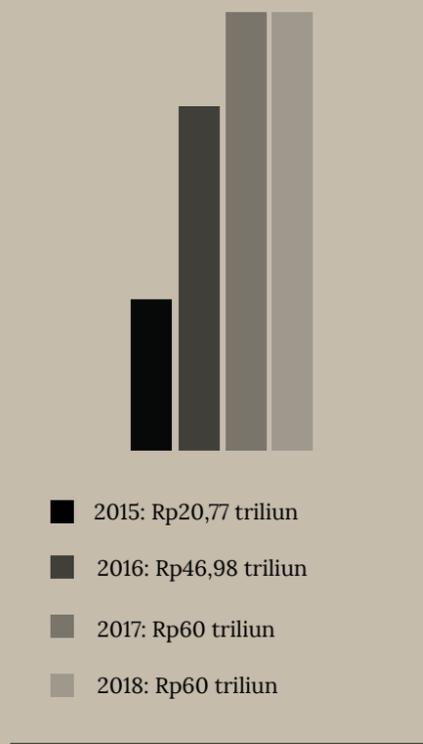
Untuk mengoptimalkan peran Dana Desa dalam tahun 2017, pada April 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meneken aturan baru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, setidaknya ada enam kebijakan strategis dalam peraturan tersebut. Pertama, pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, sehingga DAU per daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan pendapatan dalam negeri (PDN) neto. Kedua, penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana tambahan infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa.

Ketiga, kewenangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Selanjutnya, PMK baru juga mengatur penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan DAK fisik dari kabupaten dan kota. Di samping itu, gubernur juga berperan dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK fisik antardaerah, antarbidang, dan antar-DAK dengan pendanaan lainnya.

Kelima, pemerintah juga melakukan penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan beberapa indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut di antaranya pengelolaan keuangan daerah (*e-budgeting, e-planning, dan e-procurement*), pelayanan dasar publik seperti gizi buruk, dan ekonomi kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan. Terakhir adalah upaya pemerintah mengatur peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dengan menganggarkan persentase tertentu dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum.

Namun demikian, di setiap tantangan pasti ada kisah sukses yang mampu menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang ingin memajukan masyarakatnya. Dana Desa yang menanjak naik selama tiga tahun menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah terhadap Nawacita Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tercatat pada

Alokasi Dana Desa dalam APBN



tahun 2015, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp20,77 triliun, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp46,98 triliun, dan pada tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp60 triliun. Penyaluran Dana Desa yang telah bergulir sejak 2015, kini tengah menunjukkan beberapa hasil. Hal ini tidak hanya bermakna membangun daerah pinggiran kota saja, namun juga sampai ke pelosok perdesaan dan perbatasan. Media Keuangan melakukan reportase langsung ke lokasi menceritakan beberapa contoh penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain. Di antaranya adalah

Desa Blang Krueng di Aceh dan Desa Tajun di Bali.

Desa Sadar Pendidikan dan inklusi keuangan

Cerita kebangkitan Gampong atau Desa Blang Krueng dimulai sebelum adanya bencana tsunami. Sekretaris Desa Blang Krueng, Teuku Baldisyah, mulai bercerita saat itu Blang Krueng dikenal sebagai daerah konflik antara pemerintah dan gerakan aceh merdeka (GAM). Hal itu memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Saat tsunami melanda pada 26 Desember 2004, segala fasilitas gampong luluh lantak. Lebih dari 200 orang korban meninggal dunia. Segala kehidupan masyarakat pun dimulai dari nol kembali. Untuk itu, masyarakat pun sadar untuk segera bangkit dan berbenah. Keuchik (Kepala Desa) Blang Krueng, Teuku Muslem, beserta perangkat desa sadar bahwa modal utama untuk membangun gampongnya kembali adalah melalui pembangunan sumber daya manusianya. Untuk itu, mereka sepakat untuk mengutamakan pendidikan sebagai prioritas pertama.

Beruntung Dana Desa digelontorkan pada tahun 2015. Dana itu digunakan untuk membantu menyelesaikan pembangunan sekolah dan sarana infrastruktur dasar pendukung lainnya. Meski tak mencukupi untuk biaya operasional, warga gampong tetap melakukan sumbangan seikhlasnya demi berlangsungnya kehidupan sekolah tersebut. Bahkan bagi yang tidak mempunyai uang dipersilakan untuk menyumbangkan tenaga dalam rangka membangun dan melengkapi sarana sekolah. Saat ini, banyak warga desa ataupun desa tetangga yang menyekolahkan anaknya di Blang Krueng.

Atas hasil kerja kerasnya, Blang Krueng berhasil dinobatkan sebagai Desa Sadar Pendidikan Kategori Partisipatif oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2016.

Tak kalah dengan Blang Krueng, Desa Tajun di Bali juga menjadi kisah sukses pengelolaan dana desa. Dengan perbekel (sebutan kepala desa di Bali) yang berlatar belakang di bidang perbankan dan asuransi, Desa Tajun di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Bali, berhasil menjadi desa mandiri dengan ditopang oleh BUMDes yang maju dan kuat. Sebagai perbekel selama 2 periode, Kepala Desa Tajun, Gede Ardana, memahami potensi dan kebutuhan desa yang dipimpinnya. Dengan pengalamannya, Ardana berkomitmen untuk mengelola keuangan (APBDes) Desa Tajun dengan prinsip transparan, akuntabel dan tata kelola yang baik. Sebelum dana desa masuk, pada tahun 2010 Ardana telah memulai unit usaha cikal bakal BUMDes dengan hanya bermodalkan Rp10 juta. Berawal dari satu unit usaha, kini Desa Tajun telah memiliki 5 unit usaha desa dengan omzet yang hampir mencapai Rp16 miliar. Bahkan, BUMDes milik Desa Tajun yang diberi nama Mandala Giri Amerta tersebut berhasil memperoleh penghargaan sebagai BUMDes unggulan pada tahun 2016 dari Kemendes PDTT.

Memperkuat kapasitas aparatur desa dan pengawasan

Lalu Hendry Yujana, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) Kementerian Keuangan, mengatakan, saat ini pemerintah menekankan pada konsep Desa Membangun bukan Membangun Desa. Dua konsep ini sangat berbeda. Desa membangun, pintu masuknya adalah

“Tetap terintegrasi dalam program yang lain, tetapi nantinya yang diperlukan adalah perubahan pengelolaannya. Yang sebelumnya diserahkan ke swasta, sekarang diserahkan ke masyarakat untuk memperkerjakan orang-orang di kampung”

Teten Masduki
Kepala Kantor Staf Presiden

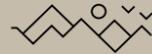
desa bukan perdesaan. Pendekatannya *locus* bukan fungsional. Tingkatannya *local development* bukan *rural development*. Konsepnya kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, alokasi dana, gerakan lokal, dan pemberdayaan. Skalanya adalah yurisdiksi desa bukan kawasan ruang lintas desa. Pemegang kewenangan Pemerintah Desa dan masyarakat bukan Pemerintah Daerah. “Dengan konsep desa membangun, inisiatif desa harus diutamakan dengan bimbingan dari pemerintah,” ujar Lalu.

Sementara itu, Lukman Nul Hakim, Direktur Keuangan pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan, terkait supervisi desa ada dua jenis pendampingan. Pertama, pendampingan teknis oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kedua, dapat ditambah dengan pendamping profesional yang direkrut oleh Kementerian Desa. Diakui Lukman, meski sudah mengalami kemajuan, namun kedua pendampingan ini masih belum optimal. SOPD dan Kecamatan masih perlu didorong untuk memberikan bimbingan teknis serta mengevaluasi APBDes. Selain itu, pendamping profesional juga masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Apalagi, saat ini distribusi dan rasio pendamping desa masih jauh dari ideal. Satu pendamping bisa menangani hingga tiga desa yang luas wilayahnya cukup besar.

Menggerakkan ekonomi perdesaan

Untuk lebih pemeratakan perekonomian sampai ke pelosok desa, pemerintah berkomitmen untuk fokus menciptakan program padat karya pada tahun depan. Terkait program padat karya, Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, menjelaskan lebih lanjut bahwa masyarakat di desa akan bisa menikmati lapangan kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur melalui skema dana desa yang telah ada, ataupun melalui program kementerian teknis lainnya yang memiliki program kegiatan di desa. Tujuannya adalah agar masyarakat di desa bisa memperoleh pekerjaan dan mendapat upah secara harian atau mingguan. Di sisi lain, daya beli masyarakat pun akan ikut terkerek naik.

“Tetap terintegrasi dalam program yang lain, tetapi nantinya yang diperlukan adalah perubahan pengelolaannya. Yang sebelumnya diserahkan ke swasta, sekarang diserahkan



Rekapitulasi pemanfaatan Dana Desa 2015-2017 Tahap I

Mendukung Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa:

121.709km Jalan Desa **1.960**km Jembatan

5.220unit Pasar Desa **21.811** BUMDES

5.116unit Tambatan Perahu **2.047**unit Embung

41.739unit Irigasi **2.366** Sarana Olahraga Desa

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa:

291.393unit Penahan Tanah **32.711**unit Air Bersih

82.356unit MCK **6.041**unit Polindes

590.371unit Drainase **21.357**unit PAUD

13.973unit Posyandu **45.863**unit Sumur

ke masyarakat untuk memperkerjakan orang-orang di kampung,” papar Teten.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, memaparkan lebih lanjut terkait skema program padat karya yang akan diterapkan dalam APBN 2018. Ia menjelaskan alokasi dana desa untuk tahun depan akan ditetapkan sekitar 30 persen untuk gaji masyarakat desa yang bekerja pada proyek swakelola. Dengan demikian, dari alokasi dana desa tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, diperkirakan akan ada sekitar Rp18 triliun alokasi dana desa untuk upah pekerja.

“Delapan belas triliun itu bisa menyerap kira-kira 400 juta hari orang kerja ya. Tinggal kalau rata-rata kerjanya 60 hari ya berarti bisa *create* sekitar 5 juta *job*. Kalau rata-rata kerja 90 hari kira-kira kita *create* 3 juta *job*,” jelas Eko.

Integrasi program padat karya

Tahun 2018 juga akan dilakukan integrasi program padat karya dengan program-program dana desa yang telah berjalan sebelumnya. Setidaknya, menurut Eko ada empat program unggulan yang akan diintegrasikan. Pertama adalah program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Program ini pada intinya bertujuan untuk membentuk kluster ekonomi di desa. Latar belakangnya dikarenakan masih banyaknya desa yang miskin padahal di beberapa desa lainnya sudah menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi. Solusinya adalah mereplikasikan bisnis model dari desa yang telah berhasil dan diterapkan ke desa yang masih miskin

melalui penentuan potensi produk yang bisa diunggulkan.

Yang kedua, lanjut Eko, adalah program pembangunan embung. Sebagai negara tropis, Indonesia seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan proses penanaman sepanjang tahun. “Indonesia yang harusnya bisa menanam tiga kali setahun, kenyataannya cuma bisa menanam 1,45 kali setahun. Sisanya tidak bisa menanam karena musim kemarau kering. Jadi, kalau permintaan Presiden sendiri, dana desa 200 sampai 500 juta diminta untuk membuat embung. Dengan adanya embung, yang tadinya menanam rata-rata cuma 1,45 kali kan berarti panennya juga 1,45 kali kan. Jadi, dengan adanya embung sekarang bisa menanam tiga kali. Akhirnya dengan lahan yang sama, pendapatan masyarakat Indonesia secara nasional bisa *double* dari sektor pertanian,” jelas Eko dengan semangat.

Ketiga adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Eko, dana desa seharusnya bukan menjadi sumber utama pembangunan di desa, namun seharusnya hanya dijadikan sebagai stimulus. Agar desa mampu membiayai pembangunan desanya sendiri, setiap desa diharapkan mempunyai badan usahanya sendiri. Terakhir adalah pembangunan sarana olahraga desa. Menurut Eko, dengan adanya sarana olahraga, masyarakat terutama anak-anak muda mempunyai tempat penyaluran bakat dan minatnya, sehingga para generasi muda bisa terhindar dari hal-hal yang mengarah kepada masalah sosial, seperti tawuran, narkoba, dan kelompok radikal.

“Delapan belas triliun itu bisa menyerap kira-kira 400 juta hari orang kerja ya. Tinggal kalau rata-rata kerjanya 60 hari ya berarti bisa create sekitar 5 juta job. Kalau rata-rata kerja 90 hari kira-kira kita create 3 juta job.”

Eko Putro Sandjojo
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



MENYEJAHTERAKAN DENGAN PEMERATAAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam ekonomi. Para pakar ekonomi dan pemerintah pun berusaha keras menggenjot pertumbuhan ekonomi agar mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun demikian, yang tak kalah penting dari sekedar menggenjot pertumbuhan adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonominya secara berkeadilan.

Undang-Undang Dasar sendiri mengamanatkan pemerataan berkeadilan dalam pembukaannya yang berbunyi "... perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Hal itu menunjukkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan kuliah umum di Harvard Kennedy School, Harvard University, Amerika Serikat beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa pendapatan per kapita global telah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 460 persen dalam jangka waktu antara 1950-2015. Sementara itu, persentase penduduk miskin di dunia juga telah turun dari 72 persen pada 1950 menjadi sepuluh persen pada 2015. Sayangnya, di dalam negeri sendiri tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun

kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin melebar.

Menurut Menkeu, tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan sejak tahun 2000. Pada rentang 2008 hingga 2012, indeks koefisien Gini Indonesia sempat dalam situasi stagnan pada angka 0,41. Pada September 2016, angkanya menurun menjadi 0,394. Namun, yang perlu dicermati kemudian adalah naiknya ketimpangan pendapatan dan kesempatan. "Pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dilihat ketika orang berkunjung ke Jakarta, sementara *progress* yang sama tidak terlihat ketika berkunjung ke daerah-daerah pinggiran," ujar Menkeu dalam presentasi berjudul "The New World Order: Indonesia's Response and Call for a Coordinated Global Response."

Indikator ketimpangan

Dalam kesempatan wawancara dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu, *lead economist* Bank Dunia, Vivi Alatas, menjelaskan bahwa pada dasarnya ketimpangan ekonomi itu merupakan *gap* antara yang kaya dan yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan *gini ratio*. Untuk dapat menurunkan *gap* tersebut, pertumbuhan penduduk yang relatif lebih miskin diharapkan

lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk yang relatif lebih kaya. Lebih jauh, yang menjadi persoalan saat ini menurutnya adalah bila pertumbuhan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak memberikan kesempatan yang sama antara orang yang ada di distribusi kelompok bawah dengan yang berada di distribusi kelompok atas.

Hal itu penting terkait dengan pemerataan kesempatan yang sama dalam menurunkan ketimpangan di masyarakat, serta menghindari pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebagai contoh, akses ke pasar tenaga kerja memang memerlukan produktivitas yang sepadan. Semua orang yang melakukan usaha lebih keras menjadikan dirinya lebih layak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Namun demikian, di sisi lain yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan pemerataan kesempatan yang sama agar setiap individu dapat bersaing dengan lebih adil. Kesempatan yang sama ini dimulai dari lingkup keluarga hingga pemerataan kesempatan dalam bekerja. "Jadi yang diinginkan bukan menjadikan orang kaya tumbuhnya menjadi sedikit, tetapi lebih memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan untuk bisa tumbuh dengan baik," jelas Vivi.

Mengatasi ketimpangan sejak dini

Sementara itu, ketimpangan nasional pada dasarnya merupakan sumbangan dari adanya ketimpangan di daerah. Salah satu cara dini untuk menurunkan ketimpangan tersebut adalah dengan memperbaiki perekonomian masyarakat miskin melalui perencanaan keluarga secara lebih baik. Staf Ahli Kependudukan Kementerian Koordinator Pembedayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sonny B. Harmadi, menjelaskan bahwa dalam era otonomi daerah, program perencanaan keluarga seperti Keluarga Berencana (KB) bukan lagi menjadi isu yang menarik bagi pemerintah daerah untuk dijadikan prioritas utama. Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan tiga hal. "Satu karena tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah secara langsung. Yang kedua, kalau jumlah penduduknya sedikit maka akan mendapatkan Dana Alokasi Umum yang sedikit juga nanti. Yang ketiga, belum ada insentif jelas bagi mereka karena hasilnya baru dilihat setelah jangka waktu yang lama," jelasnya.

Oleh karena itu, agar dapat mendorong peran serta dari pemerintah daerah dalam menyukseskan program perencanaan keluarga, ia menyarankan agar program

seperti Dana Alokasi Khusus dijadikan sebagai insentif pemerintah daerah dalam memahami prioritas pembangunan yang harus didukung dari level daerah. Hal penting lainnya adalah membangun visi yang sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik saja, tetapi yang lebih penting adalah infrastruktur sumber daya manusianya. Infrastruktur sumber daya manusia terdiri dari manusianya sendiri dan kompetensi yang melekat pada dirinya, baik yang berupa *knowledge* ataupun *attitude*-nya. Untuk itu, ia mendorong adanya gerakan revolusi mental, berupa perubahan cara berpikir, cara hidup, dan cara kerja.

Resep fiskal atasi ketimpangan

APBN sebagai instrumen fiskal memiliki peran besar dalam meredistribusikan pendapatan di masyarakat. Tujuannya tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menurunkan ketimpangan di masyarakat. Dalam sambutannya di acara Oxfarm dan INFID, Menkeu menjelaskan bahwa pajak menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran penting untuk mengatasi ketimpangan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Menurutnya, kemampuan aparaturnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak menjadi tidak mudah ketika penyembunyian aset dan pendapatan masih dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus dilakukan, termasuk dengan memperbaiki peraturan-peraturan perpajakan.

Senada dengan Menkeu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PK APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menjelaskan dalam konteks pajak sebagai instrumen untuk redistribusi pendapatan, kebijakan perpajakan secara langsung mempunyai pengaruh pola redistribusi pendapatan atau dengan kata lain *collect more from rich and less from poor*.

"Pertumbuhan ekonomi yang cepat bisa dilihat ketika orang berkunjung ke Jakarta, sementara progress yang sama tidak terlihat ketika berkunjung ke daerah-daerah pinggiran,"

Srimulyani Indrawati
Menteri Keuangan



Indeks Koefisien Gini Indonesia tahun 2011 hingga Maret 2017



Sumber BPS

Pajak juga dapat menjadi alat redistribusi pendapatan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Menurut Rofy, sekitar 80 persen penerimaan pajak bersumber dari pulau Jawa yang sebagian dibagikan dan dialokasikan ke wilayah lain, termasuk diberikan dalam bentuk transfer ke daerah.

Lebih jauh, Rofiyanto juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan beberapa kebijakan lain untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan akses infrastruktur dasar (pendidikan, kesehatan, konektivitas), meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, meningkatkan akses ke permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan berupaya meningkatkan akses ke pekerjaan berkualitas.

Jaring pengaman sosial

Dalam APBN 2017 telah dialokasikan anggaran untuk program bantuan sosial. Sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima. Untuk itu, pemerintah melakukan transformasi Belanja

Bantuan Sosial dari yang semula bersifat *unconditional cash transfer* menjadi *conditional cash transfer*. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (PFM Kemensos), Andi Z.A. Dulung, menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu contoh dari *unconditional cash transfer*. Namun, untuk lebih memberdayakan masyarakat dan memperbaiki sistem dan akurasi penyaluran, perlu diberikan persyaratan tertentu. Tujuannya tak lain adalah untuk mendorong masyarakat agar menggunakan dana bantuan sosialnya secara lebih efektif dan tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan.

Sementara itu, Kepala PK APBN, Rofy turut mengungkapkan peran strategis belanja bantuan sosial dalam APBN selain untuk program perlindungan sosial juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam menghadapi gejolak/goncangan ekonomi. Misalnya, belanja bantuan sosial yang direalisasikan dalam bentuk BLT yang diberikan untuk setiap kenaikan harga BBM saat Indonesia masih menerapkan kebijakan subsidi BBM. Bantuan tersebut diberikan tanpa syarat (*unconditional cash transfer*) untuk melindungi keluarga miskin terhadap

dampak ekonomi akibat peningkatan harga BBM. Harapannya, melalui bantuan tersebut masyarakat miskin dapat terjaga daya belinya.

APBN untuk pemerataan

Untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong keadilan ekonomi dalam APBN 2018. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Teten Masduki, menjelaskan beberapa arahan Presiden yang merupakan terobosan dalam APBN tahun depan. Pertama, APBN 2018 akan membuka akses lahan secara adil kepada masyarakat. Kedua, mempermudah akses terhadap pembiayaan, dan ketiga adalah mendorong pendidikan jalur vokasi. Selain itu, menurutnya terdapat tiga hal yang juga perlu segera diselesaikan, yakni menciptakan lapangan kerja, pengendalian harga pangan, dan mengefektifkan bantuan sosial agar daya beli masyarakat menguat, serta menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN 2018 sendiri, Presiden sudah memerintahkan agar dana desa bisa pemeratakan penciptaan lapangan kerja melalui program dana desa yang dilakukan secara swakelola dan dikerjakan secara

“Jadi yang diinginkan bukan menjadikan orang kaya tumbuhnya menjadi sedikit, tetapi lebih memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan untuk bisa tumbuh dengan baik,”

Vivi Alatas
lead economist
Bank Dunia

padat karya. Di sisi lain, program pembangunan infrastruktur sederhana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta program pengadaan bantuan di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga bisa dikerjakan di daerah sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

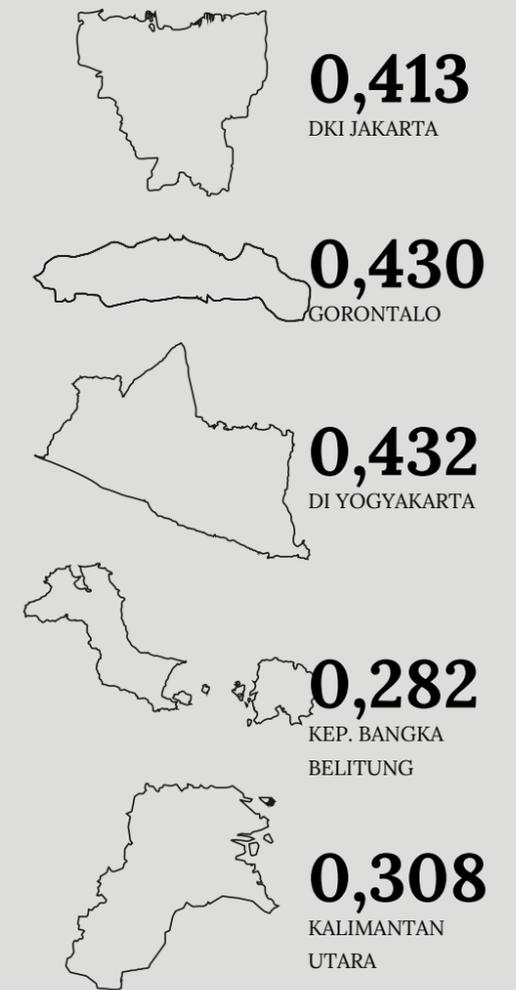
“Kita ingin tetap pembangunan infrastruktur dilakukan. Sanitasi untuk air bersih, serta infrastruktur desa lain tetap dikerjakan, sehingga daya beli masyarakat kuat. Di samping itu, sekarang ada program yang sedang di-*push* yang mempunyai dampak pada penciptaan lapangan kerja, yaitu perhutanan sosial,” jelasnya.

Mengakselerasi ekonomi berkeadilan

Menjawab isu kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, Teten menjelaskan bahwa kuncinya adalah menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Menurutnya perlu adanya perbaikan di sektor konsumsi, serta perbaikan peringkat bisnis di Indonesia. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dapat merangsang dan meningkatkan investasi sehingga industri dalam negeri mampu menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Dengan adanya perubahan-perubahan struktural ekonomi dan kemudahan berusaha melalui pemangkasan perijinan di birokrasi, maka ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*) bisa diturunkan.

Menghadapi kondisi tersebut, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Kunta Wibawa menjelaskan dalam APBN 2018 *outlook* dari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Karena itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 5,4 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, otomatis target penerimaan pajak juga menjadi lebih besar. Dengan demikian, APBN 2018 dibuat secara realistis dan *achievable*. Di sisi lain, dari sisi belanja, pemerintah juga mendorong agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Untuk itu, belanja masih diprioritaskan untuk memacu infrastruktur. Harapannya, *high cost economy* mulai berkurang karena biaya logistik barang dari satu tempat ke tempat lain menjadi murah.

Indeks Koefisien Gini Indonesia Maret 2017 = 0.393



Sumber BPS



LKPP MENCETAK REKOR

Tahun 2017, pemerintah bagai memetik buah kerja keras dalam mengelola keuangan negara. Untuk pertama kalinya selama 12 tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini merupakan hasil usaha dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan cerminan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui LKPP. Secara teknis, LKPP disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kriteria pemeriksaan yang ditetapkan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Perjalanan menuju opini terbaik

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini terbaik dari BPK yang menjadi incaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. BPK akan memberikan Opini WTP jika laporan keuangan dianggap memenuhi kriteria di atas dan secara umum semua informasi yang disajikan tidak ada yang dikecualikan.

Kementerian Keuangan pertama kali menyampaikan pertanggungjawaban LKPP sejak tahun 2004. Tercatat sejak tahun 2004 hingga 2008, BPK mengeluarkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*). Opini ini mengindikasikan belum ada kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Beberapa alasan belum tercapainya Opini WTP antara lain kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, belum tertibnya penempatan uang negara dan belum adanya *single treasury account* pemerintah, tidak adanya

inventarisasi aset serta utang maupun piutang negara, dan sistem teknologi informasi yang kurang andal dan tidak terintegrasi.

Pada tahun-tahun berikutnya, peningkatan kualitas LKPP tak pernah berhenti dilakukan. Wujud keseriusan Kementerian Keuangan dilakukan melalui perbaikan yang sungguh-sungguh dalam setiap temuan dan rekomendasi BPK atas pemeriksaan LKPP. Tentu saja, tujuan akhir pengelolaan keuangan negara tidaklah berhenti sampai pada raihan opini WTP dari BPK.

Pada tahun 2009, upaya Kementerian Keuangan memperbaiki kualitas LKPP terbukti membuahkan hasil dengan diterimanya Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP ini diterima sejak tahun 2009 hingga 2016. Beberapa alasan penetapan Opini WDP antara lain permasalahan pajak, pencatatan yang tidak memadai (misalnya, ketidaksesuaian pencatatan laporan dengan bukti fisik), permasalahan dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap, dan permasalahan utang.

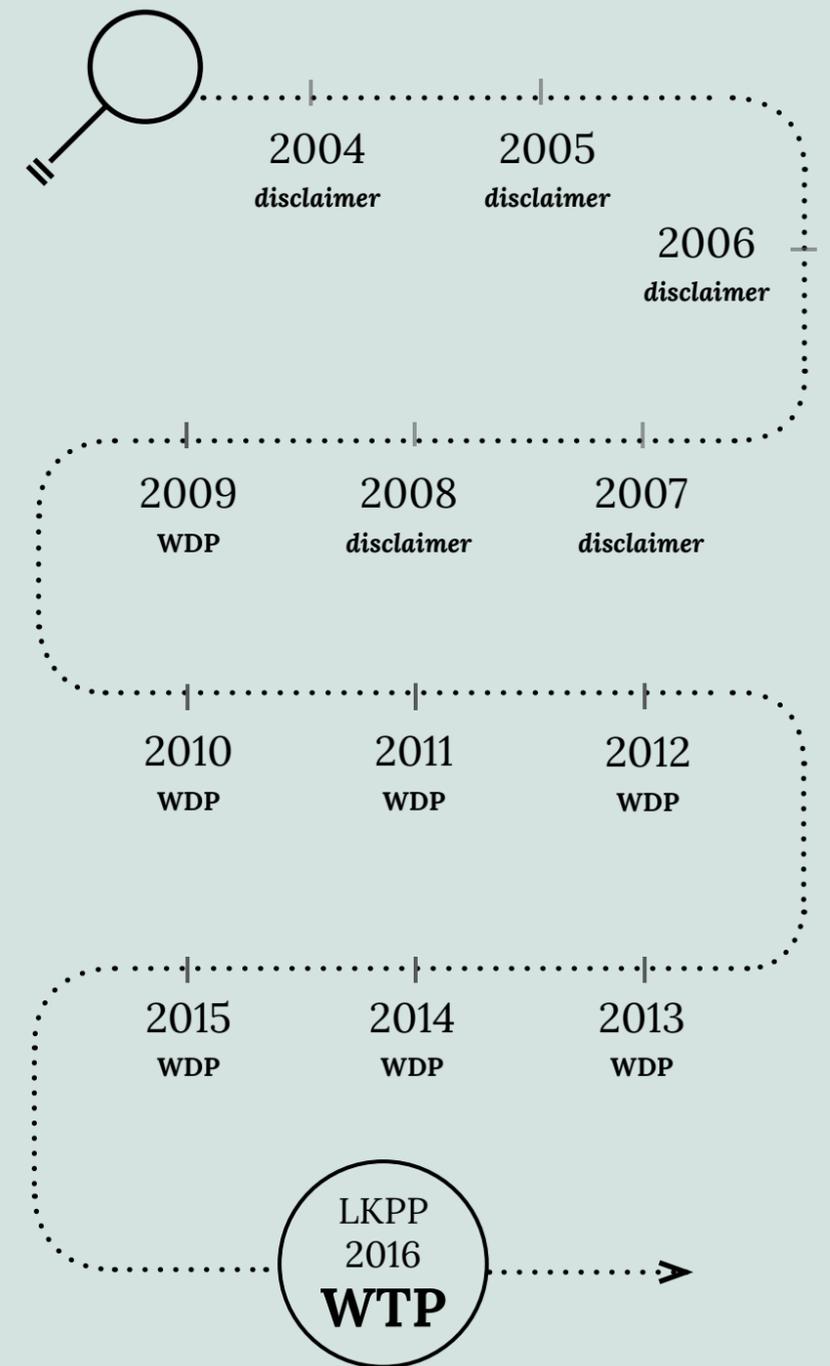
Pada akhirnya, pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, LKPP Tahun 2016 meraih Opini WTP dari BPK. Kementerian Keuangan

menunjukkan keseriusannya untuk melakukan perbaikan atas permasalahan yang muncul dari pemeriksaan tahun sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan antara lain penerbitan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, perbaikan pengelolaan dan penatausahaan Piutang Bukan Pajak, serta membangun *single database* yang terintegrasi.

Dalam laporannya, BPK menyampaikan bahwa seluruh aspek material telah tersajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti beberapa temuan dalam Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan. Namun BPK menjelaskan bahwa temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

Pada penilaian laporan keuangan tahun 2016 di tingkat Kementerian/Lembaga, dari 88 lembaga yang melakukan pelaporan, 74 institusi mendapatkan Opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2016. Capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana hanya 56 institusi yang mendapatkan Opini WTP dari 86 lembaga.

Dengan berhasilnya Kementerian Keuangan meraih Opini WTP, bukan berarti kinerja pemerintah tidak membutuhkan perbaikan. Berdasarkan hasil rekomendasi BPK, masih ada beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut antara lain pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan piutang beberapa



Presiden juga menyampaikan esensi dari akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral kepada rakyat. APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan harus dipastikan bahwa rakyat benar-benar mendapat manfaat dari APBN.

Kementerian/Lembaga, serta pengelolaan hibah langsung. Hal tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

Manfaat Opini WTP

Laporan keuangan mampu menggambarkan kualitas pengelolaan keuangan suatu entitas, termasuk bagaimana opini diberikan oleh BPK atas laporan keuangan tersebut. Dengan diperolehnya Opini WTP, Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara dapat menginformasikan kepada publik bahwa APBN yang diamanatkan oleh rakyat telah dikelola sesuai praktik pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai peraturan perundangan.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelaporan Keuangan 2017, Presiden Jokowi mengimbau agar pengelolaan keuangan negara lebih mengarah pada perbaikan sistem. APBN harus mampu menyentuh rakyat melalui peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, maupun pembangunan infrastruktur.

Presiden juga menyampaikan esensi dari akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral kepada rakyat. APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan harus dipastikan bahwa rakyat benar-benar mendapat manfaat dari APBN. Maka, laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tentu akan menggambarkan hasil pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel.



Hasil Audit Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) tahun anggaran 2016

74	LKK/L menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian
8	LKK/L menerima opini Wajar Dengan Pengecualian
6	LKK/L menerima opini Tidak Memberikan Pendapat

1. Perbaikan pemerintah yang membuat LKPP Tahun Anggaran 2016 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Penerbitan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
3. Perbaikan pengelolaan dan penatausahaan Piutang Bukan Pajak;
4. Pembangunan single database yang terintegrasi.

Belajar keuangan negara
Kapan saja &
Di mana saja



 **klc.kemenkeu.go.id**
KEMENKEU LEARNING CENTER

**MEMPERINGATI
HARI GERAKAN SATU JUTA POHON
10 JANUARI 2018**

Foto
Ahmad Faiz A.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**